

PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI DANA KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DESA PANGKALAN BUTON KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
TANTI SISKATIA
NIM. E11110021

Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura
Pontianak, Tahun 2015

Email: siskatiatanti@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian secara umum untuk mengetahui kejelasan secara objektif tentang nilai manfaat dana PNPM Mandiri bagi pengembangan usaha kecil menengah Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana. Sebagai program yang mendorong meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi keluarga miskin, yang dalam hal ini masyarakat yang memiliki usaha tetapi dengan modal yang terbatas, maka program PNPM Mandiri di Desa Pangkalan Buton sudah menunjukkan upaya yang riil bagi pengembangan usaha yang ada. Metode yang dipergunakan dan dianggap sesuai adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Dampak pengembangan usaha kecil melalui dana kredit PNPM Mandiri bagi masyarakat Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana terlihat pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan. (2) Faktor penghambat seperti lemahnya birokrasi, kredit macet, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan kinerja kelompok yang lemah.

Kata-kata Kunci: UKM, PNPM, dan Dana Kredit

Abstract

The research objective is generally to determine objectively clarity on the value of the benefits of PNPM Mandiri for the development of small and medium enterprises Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana. As a program that encourages increasing prosperity, especially for poor families, which in this case people who have a business, but with limited capital, the PNPM Mandiri in Desa Pangkalan Buton has shown that real efforts for the development of existing businesses. The method used and deemed appropriate is a qualitative method. Based on the results of data analysis can be concluded that: (1) The impact of small business development through a credit fund for community PNPM Mandiri of Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana visible on increasing employment opportunities and increased prosperity. (2) Inhibiting factors such as weak bureaucracy, bad credit, lack of community involvement, and the weak performance of the group.

Keywords : SME, PNPM and Credit Fund

A. Pendahuluan

Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, termasuk salah satu sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Sumber mata pencaharian masyarakat di desa ini beragam, yakni sebagai petani, nelayan, pedagang dan lain sebagainya. Lahan pertanian di desa tersebut tidak begitu banyak memberikan hasil, sehingga pekerjaan yang paling dominan untuk usaha mereka adalah berdagang. Mereka meminjam pada siapapun, termasuk pada PNPM Mandiri, sebagai modal awal dan juga untuk pengembangan usaha kecil mereka demi meningkatkan pendapatan sehari-hari. Berdasarkan data umum, desa Pangkalan Buton pada Oktober 2012 memiliki kepala keluarga sebanyak 893 kk; laki-laki berjumlah 1672 jiwa dan perempuan 1656 jiwa. Total jumlah penduduk saat itu sebanyak 3328 jiwa. Desa ini memiliki 4 dusun dengan luas 720 km persegi.

Secara umum PNPM mandiri sebagai program penanggulangan kemiskinan lebih mengutamakan pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya, dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pola partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini, masyarakat miskin sebagai

kelompok sasaran, ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Berdasarkan data dari Kecamatan Sukadana pada 2012, jumlah dana PNPM di kecamatan ini sebesar Rp 175 juta dibagikan ke 7 desa yang ada. Tahun 2013 di kecamatan yang sama mendapatkan Rp 183 juta untuk 10 desa dan pada 2014 didapatkan dana, sebesar RP 120 juta, dibagikan ke 10 desa. Penerima data di atas merupakan mitra PNPM dalam bentuk kelompok usaha. Pinjaman kelompok minimal 5 orang berkisar antara 3 sampai 5 juta Rupiah.

Jenis usaha kecil saat ini relatif berkembang di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Indonesia mau berusaha, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru tanpa harus selalu tergantung kepada pemerintah. Usaha kecil adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Begitu juga yang berkembang di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, usaha kecil ini memiliki peranan penting dalam mendorong perekonomian masyarakat. Selain dari itu, usaha kecil juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. Usaha kecil ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil Desa Pangkalan Buton,

Kecamatan Sukadana, dan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Namun di sisi lain, usaha kecil Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar di hadapan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank yang proses perolehannya disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar warga setempat belum memiliki akses ke arah itu. Pada sisi investasi sendiri, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk usaha kecil: antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

Usaha kecil Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, yang pada umumnya merupakan usaha keluarga, mempunyai jaringan pemasaran yang terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi jumlah produk yang dihasilkan juga terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif sehingga kalah bersaing dengan produk-produk buatan para pelaku usaha besar. Berbeda dengan usaha besar yang

telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

Sebagai program yang mendorong meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi keluarga miskin, yang dalam hal ini masyarakat yang memiliki usaha tetapi dengan modal yang terbatas, maka program PNPM Mandiri di Desa Pangkalan Buton sudah menunjukkan upaya yang riil bagi pengembangan usaha yang ada.

B. Kerangka Teori

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa diharapkan saling berhubungan baik terhadap sesamanya, memiliki rasa kebersamaan, hidup tolong menolong, saling bekerja sama, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Begitu pula halnya dalam melaksanakan tugas kehidupan dan pembangunan bangsanya manusia dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri. Sebab dalam melakukan pembangunan dalam masyarakat tiga komponen yaitu pemerintah, swasta dan

masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan peranannya. Mubyarto (dalam Abu Huraerah, 2008:19) mengatakan: “Partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di mana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan”. Isbandi (2007: 27) mengatakan: “Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.”

Kesimpulan pendapat di atas bahwa partisipasi masyarakat adalah proses pelaksanaan kegiatan saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dan pengembangan dari pelaksanaan program tersebut, termasuk menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut. Lebih lanjut secara sederhana partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang (individu) atau sekelompok masyarakat secara sukarela, dalam suatu kegiatan mulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan kegiatan, sampai kepada proses pengembangan kegiatan atau program tersebut.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell (dalam Hetifah, 2009: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang

berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan

lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan.

Sunyoto Usman (2004:32) mengatakan, pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Selanjutnya Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan atau ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi atau belum layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah, padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain

masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural.

Sumodiningrat (1999:55)

mengatakan konsep pemberdayaan usaha masyarakat secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian

- sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
 5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial
 6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Berdasarkan enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa: pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasi ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh.

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Menurut www.pnpm-mandiri.org bahwa:

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan

dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PNPM mandiri adalah suatu program yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, dimana program tersebut dikembangkan melalui harmonisasi sistem dan prosedur program serta penyediaan dana secara simultan.

Tujuan umum dari PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khusus dari PNPM Mandiri adalah:

1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*)
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan **pembangunan**, yang dalam konteks PNPM Mandiri pedesaan diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya.

1. Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection*); dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

2. Pengembangan Masyarakat (*Social Development*); tiap langkah kegiatan

PNPM Mandiri Perkotaan harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat;

3. Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*); dalam upaya menyasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan/ atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial (<http://www.p2kp.org>).

Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar

mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi.

C. Metode Penelitian

Pemilihan metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah, sebab metode merupakan cara untuk mencapai tujuan. Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena tujuan umum penelitian adalah untuk mengungkap masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan.

Metode yang dipergunakan dan dianggap sesuai adalah metode deskriptif kualitatif. Djarn'an Satori dan Aan Komariah (2011:25) menyatakan bahwa; "Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik

pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah".

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena ingin menggambarkan secara objektif mengenai pengembangan usaha kecil menengah melalui dana kredit Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana. Data yang dikaji dan diuraikan dalam bentuk kata-kata maupun kalimat akan di analisis secara empiris.

Pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1. Merumuskan serta mendefinisikan masalah

Langkah pertama dalam meneliti adalah menetapkan masalah yang akan dipecahkan. Untuk menghilangkan keragu-raguan, masalah tersebut didefinisikan secara jelas.

2. Mengadakan studi kepustakaan

Setelah masalah dirumuskan, step kedua yang dilakukan dalam mencari data yang tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kerja mencari bahan di perpustakaan merupakan hal

yang tak dapat dihindarkan oleh seorang peneliti.

3. Mengumpulkan data

Peneliti memerlukan data untuk menjawab permasalahan. Data tersebut yang merupakan fakta yang digunakan untuk dikumpulkan. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumenter.

4. Menyusun, Menganalisa, dan Menyusun Interpretasi

Setelah data terkumpul. peneliti menyusun data untuk mengadakan analisa Data tersebut disusun lebih dahulu untuk mempermudah analisa. Penyusunan data dapat dalam bentuk label dan membuat coding untuk diberikan tafsiran atau interpretasi terhadap data tersebut.

5. Membuat generalisasi dan kesimpulan

Setelah tafsiran diberikan, maka peneliti membuat generalisasi dari penemuan-penemuan, dan selanjutnya memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan dan generalisasi ini berkaitan dengan permasalahan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2014 sampai dengan Maret 2015 yang direncanakan

sekitar 10 bulan. Namun jadwal yang direncanakan dapat saja berubah karena berbagai faktor. Untuk itu agar penelitian ini dapat tercapai secara maksimal, diperlukan rencana yang sistematis dan terarah.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Staf Desa, Pengurus RW/RT dan warga Desa Pangkalan Buton yang telah memanfaatkan PNPM Mandiri. Sedangkan Objeknya adalah PNPM Mandiri yang ada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara.

Sasaran wawancara ini adalah fasilitator PNPM, ketua kelompok dan anggota usaha kelompok. Isi dari

wawancara berhubungan dengan pengembangan usaha kecil dengan menggunakan dana PNPM Mandiri. Peneliti langsung melakukan wawancara terhadap narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga dilakukan dengan metode observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis. Observasi adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah, pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencakup fenomena satu atau sekelompok orang dalam kompleks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Observasi ini dilakukan dengan cara mendatangi atau mengunjungi objek penelitian, seperti jenis usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok PNPM.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain tentang subjek yang akan diteliti. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang

tersedia adalah berbentuk surat-surat, foto-foto dan dokumen lain. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data administrasi PNPM, dan foto-foto usaha kecil.

Analisis data juga diperlukan dalam penelitian kualitatif, analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan data

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan.

a. Kredibilitas

Sugiyono (2013:368) mengatakan bahwa: "Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*".

Berdasarkan pendapat di atas bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan sumber data.

b. Dependabilitas
Lexy J. Maleong (2013:79) mengatakan: “Dependabilitas atau reliabilitas instrumen adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan”. Jadi dependabilitas atau reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan ulang terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Untuk dapat mencapai tingkat reliabilitas dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan teknik ulang atau *check recheck*.

c. Konfirmabilitas
Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha sedapat mungkin memperkecil faktor subyektifitas. Penelitian akan dikatakan obyektif bila dibenarkan oleh peneliti lain. Maka obyektifitas diidentikkan dengan istilah “*confirmability*”. Untuk mendapatkan obyektivitas ini, para peneliti harus mampu menanggalkan subyektivisme, baik subyektivisme yang datang dari pihak peneliti, maupun subyektivisme yang datang dari sasaran penelitian. Agar

obyektivitas tersebut dapat diperoleh, maka para peneliti harus mampu menampilkan indikator atau alat ukur yang valid, dan sekaligus menggunakannya.

2. Analisis Data

Analisa data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreatifitas dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data di sini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu (M. Kasiram, 2006: 274).

Oleh karena itu maka menganalisis data, peneliti peneliti bekerja dengan data, lalu mengorganisasi data, kemudian memecah data menjadi unit-unit data yang berarti, mesintesis data satu dengan yang lain, selanjutnya mencari pola-pola tertentu, mencari hal-hal yang penting

untuk dipelajari dan apa yang akan disajikan.

D. Pembahasan

Memasuki era reformasi, kegiatan pembangunan semakin meningkat baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Peningkatan pembangunan itu kian tampak setelah adanya pemberian kewenangan kepada daerah secara penuh untuk mengurus dan mengelolah rumah tangganya sendiri. Dalam kondisi seperti itu tentu diperlukan kemampuan dalam berbagai aspek sumber daya manusia dalam mengelola daya yang tersedia.

Sebagaimana dikehendaki, pembangunan senantiasa diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat desa ataupun kelurahan sebagai unit wilayah terkecil, dengan mengedepankan berbagai metode atau pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pada masa orde baru sistem perencanaan pembangunan bersifat sentralistik yang proses dan mekanisme perencanaan pembangunan mengacu kepada perencanaan dari atas atau *top-down planning*. Maka, dengan bergulirnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah pada era reformasi ini, orientasi

perencanaan pembangunan mengalami pergeseran proses dan mekanisme menjadi perencanaan pembangunan yang mengacu kepada perencanaan dari bawah ke atas atau *bottom-up planning*. Perencanaan pembangunan dari bawah ke atas merupakan proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat bawah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring atau evaluasi program pembangunan. Salah satu model yang mengimplementasikan pola pembangunan tersebut adalah PNPM Mandiri Pedesaan.

Melalui program ini dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh- kembangkan. Sehingga masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam

upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini dilakukan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan. PNPM-MP mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999.

Program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan lokal melalui pendampingan, pelatihan, dan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Dalam PNPM Mandiri Pedesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pemanfaatan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desa. Cara menetapkan kebutuhan prioritas dengan cara meranking usulan-usulan proposal dari masing-masing kelompok oleh kepala desa dan aparat desa, BPD yang dibantu oleh petugas fasilitator kecamatan yang ditugaskan di Kecamatan Sukadana sampai pada pelaksanaan kegiatan dan

keberlanjutannya. Perankingan dilakukan dengan mengurutkan usulan proposal, urutan didasarkan pada kebutuhan dana yang diperlukan.

Di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, sosialisasi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan telah dimulai sejak tahun 2007, yang kegiatan sosialisasinya dimulai dari Kecamatan Sukadana dalam bentuk sosialisasi kecamatan dan dilanjutkan dengan sosialisasi di Desa Pangkalan Buton.

Dalam proses pembangunan, sering kali muncul berbagai permasalahan yang menyangkut kemampuan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan dalam melakukan berbagai penyesuaian terhadap program-program pembangunan tersebut. Dalam kenyataannya, seringkali terdapat perbedaan kemampuan di masyarakat itu sendiri dalam menerima dan mengelola berbagai bantuan yang datang kepada mereka. Hal ini berhubungan dengan perbedaan dalam kemampuan secara sosial dan ekonomi di antara berbagai golongan masyarakat tersebut.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa untuk melancarkan, mengefektifkan dan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, penduduk miskin diharapkan membentuk kelompok yang dijadikan wadah untuk mengarahkan pelayanan

penanggulangan kemiskinan. Kesatuan dan persatuan dalam kelompok bermanfaat untuk menggali permasalahan bersama dan merumuskan langkah penanggulangan masalah tersebut di antara anggota.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Namun, potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan gagasan awal, dan untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani yang dapat menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Dampak positif dari pengembangan usaha kecil melalui dana kredit PNPM Mandiri bagi masyarakat Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana adalah:

a. Penciptaan Peluang Kerja

Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan menunjuk pada suatu tugas atau kegiatan yang diharapkan dapat menghasilkan uang.

Seorang isteri yang semula hanya menggantungkan mata pencaharian hidupnya pada suami, setelah mendapatkan bantuan di PNPM mandiri perdesaan, yang bersangkutan mempunyai pekerjaan sampingan atau alternatif yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan.

b. Penambahan Modal

Suatu usaha dimulai karena adanya suatu peluang bisnis dan ketertarikan pada keuntungan yang diharapkan dari usaha tersebut. Mewujudkan peluang menjadi kenyataan adalah proses yang memerlukan waktu relatif cukup lama. Waktu diperlukan untuk menjajaki prasyarat dan sejumlah pertimbangan, seperti menjajaki layak tidaknya suatu usaha tersebut, pencari sumber modal, ketersediaan bahan baku, sumber daya alam dan tenaga kerja yang tersedia serta ketersediaan pasar untuk menyalurkan barang atau jasa.

PNPM Mandiri Perdesaan menciptakan lembaga pengelola yang cukup banyak, baik di desa maupun di kecamatan. Salah satunya adalah kelompok simpan pinjam perempuan (SPP). Kegiatan SPP ini merupakan kegiatan penambahan modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan

pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

c. Meningkatkan pendapatan rumah tangga

Suatu program dapat dikatakan efektif apabila dalam pemanfaatan prasarana dan sarana termasuk dana digunakan sesuai dengan tujuan awal, serta program tersebut dapat memberikan manfaat bagi pelaku dan sasarannya. Pelaksanaan dan pengelolaan program dana pinjaman modal di Desa pangkalan Buton cukup berjalan dengan baik meskipun dalam perjalanannya masih ditemukan kendala-kendala. Masyarakat yang memperoleh kredit bergulir PNPM-MP dengan memberi modal mulai mengembangkan UKM, mereka membeli bahan baku dan alat-alat produksi, sehingga penghasilan meningkat. Semua ini menjadikan masyarakat memperoleh laba/keuntungan dari usaha mereka. Yang tadinya tidak memiliki usaha mulai membangun usaha dan yang mempunyai usaha berusaha meningkatkan usahanya. Dari laba/keuntungan yang diperoleh menjadikan pendapatan mereka juga naik.

d. Peningkatan kesejahteraan

Kebijakan pemberdayaan usaha kecil secara umum diarahkan untuk

mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam kerangka itu, pengembangan usaha kecil diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing. Sementara itu, pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan.

E. Penutup

1. Dampak pengembangan usaha kecil menengah melalui dana kredit PNPM Mandiri bagi masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, seperti memiliki pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan ini secara lahir tidak mudah diamati. Hanya dengan pengamatan yang lebih dekat pada informan, peningkatan itu akan lebih terlihat pengembangan usaha kecil melalui dana kredit yang dimaksud. Sesuai dengan namanya lebih ditekankan pada bantuan finansial

dari pada hal-hal yang bersifat teknis, misalnya dalam produksi dan pemasaran.

2. Sosialisasi kegiatan pengembangan usaha kecil menengah melalui dana kredit PNPM Mandiri bagi masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, telah dimulai dari Kecamatan Sukadana, sejak tahun 2007. Kegiatan itu kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Pangkalan Buton. seperti; Penentuan Bunga Simpanan dan Bunga Pinjaman, Aturan Pengelolaan Pinjaman.
3. Faktor keberhasilan pengembangan usaha kecil menengah melalui dana kredit PNPM Mandiri bagi masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, di mata warga desa yang bersangkutan dipandang sebagai suatu yang baru dan menyenangkan. Rasa senang menerima bantuan itu menjadikan mereka termotivasi dan berpartisipasi secara lebih serius dalam mengembangkan usaha. Namun, sebagai masyarakat awam dalam berdagang. Faktor ketidakberhasilan untuk menjadi pengusaha yang baik masih terkendala oleh adanya kredit macet dan lemahnya komunikasi di antara anggota. Pada saat yang sama, para anggota kelompok usaha kecil

merasa masih ada kebijakan pemerintah yang dirasakan masih menyulitkan, yakni soal birokrasi.

F. Referensi

Buku-Buku:

Boediono. 2012. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia

Hamdi, Muchlis. 2010. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

[Http://www.pnpm-mandiri.org](http://www.pnpm-mandiri.org). *Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri*. diakses pada 27 Februari 2014

Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora

Kasiram, M. 2006. *Metode Statistika*. Jakarta: Bina Aksara

Maleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nawawi, Hadari. 2010. *Metode Penelitian Bidang Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta

Sudjana, Nana. 2003. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sumaryadi. 2005. *Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sumidiningrat, Gunawan 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia

Suwondo, Kutut. 2005. *Civil Society Di Aras Lokal: Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Rukminto Adi, Isbandi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press

Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Tanti Siskatia
NIM / Periode lulus : E11110021/IV
Tanggal Lulus : 25 Mei 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Sosiatri
E-mail address/ HP : siskatiatanti@gmail.com / 085252401260

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Sociodev*) pada Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI DANA KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)MANDIRI DESA PANGGKALAN BUTON, KECAMATAN SUKADANA, KABUPATEN KAYONG UTARA

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.


Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mentertama disetujui
Pengelola Jurnal Sociodev

Antonía Sasap Abao, S.Sos, M.Si
NIP. 198105102005012017

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 11 September 2015


Tanti Siskatia
NIM. E11110021

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)